



RENCANA AKSI KEGIATAN

2020-2024

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III DUMAI

RAK

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III DUMAI



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kondisi Umum	4
C. Potensi dan Permasalahan	12
D. Lingkungan Strategis	21
BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	25
A. Visi dan Misi	25
B. Tujuan	26
C. Sasaran Strategis	27
BAB III ARAH KEBIJAKAN,STRATEGI, DAN KERANGKA REGULASI	29
A. Arah Kebijakan	29
B. Strategi	29
C. Kerangka Regulasi	30
BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN.....	32
A. Target Kinerja	32
B. Kegiatan	33
C. Pendanaan Kegiatan	37
BAB V PEMANTAUAN, PENILAIAN, DAN PELAPORAN	38
BAB VI PENUTUP	40



KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai (perubahan pertama) tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (perubahan pertama) bertujuan untuk menyesuaikan target indikator kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan yang selaras dengan Rencana Aksi Program Ditjen P2P dan Renstra Kemenkes 2020-2024.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk Negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi kepala Subbagian dan Kepala Seksi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai, diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (perubahan pertama) 2020-2024, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan bermanfaat bagi kita semua.

Dumai, 31 Agustus 2020
Kepala Kantor,

H. Erizon, SKM
NIP. 196212261986031001



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan.



Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Kepmenkes Nomor 356/Menkes/Per/IV 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, sebagaimana yang telah diubah dengan Permenkes RI Nomor : 2348 Tahun 2011 bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantina, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Pada saat ini pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuknya barang, jasa dan manusia, akan tetapi sudah berkembang lebih jauh menjadi sentra-sentra industri yang menyerap banyak tenaga kerja, pusat perdagangan, tempat wisata yang mampu mendatangkan turis baik domestik maupun luar negeri. Pelabuhan Dumai merupakan salah satu pelabuhan yang ada di wilayah Indonesia dan memiliki aktivitas yang sedang akan pergerakan alat angkut, muatan maupun orang. Mobilitas ini dapat



menyebabkan kemungkinan penyebaran penyakit antar satu daerah ke daerah yang lain juga semakin meningkat.

Penyusunan rencana aksi kegiatan satuan kerja KKP Kelas III Dumai Tahun 2015 yaitu disusun ulang karena adanya perubahan SOTK baru Kemenkes RI yaitu Permenkes RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI dimana Ditjen P2PL berganti nama dengan Ditjen P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) dan berdasarkan Renstra 2015–2019 dan Permenkes RI Nomor 356 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Permenkes RI Nomor 2348 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan,

Permenkes Nomor 356 Tahun 2008 sebagai mana yang telah diubah dengan Permenkes RI Nomor 2348 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan serta tetap sejalan dengan *International Health Regulation (IHR)* Tahun 2005, maka dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) mulai Tahun 2015 mengacu pada satu program yakni Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dengan salah satu indikator yakni terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk cegah tangkal penyakit di pelabuhan, Bandar udara dan pos lintas batas.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 KKP Kelas III Dumai ini diharapkan dapat tercapai upaya kesehatan yang berkesinambungan dalam hal pelaksanaan upaya pengendalian seluruh kondisi potensial untuk cegah tangkal penyakit di Pelabuhan Dumai. Disamping itu juga, diharapkan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan/anggaran KKP Kelas Dumai dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan



B. Kondisi Umum

Secara umum, pada tahun 2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai telah dapat melaksanakan dan merealisasikan seluruh program dengan tercapainya target indikator kinerja. Berdasarkan hasil kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai berhasil mencapai 11 indikator dari 12 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Terdapat 4 indikator kinerja yang mencapai realisasi melebihi target atau diatas 100%, terdiri dari adalah indikator Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan (129,08%), indicator Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit (154,44%), indikator Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung (182,43%) dan indikator Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya (110%). Sedangkan untuk indikator yang tidak tercapai atau di bawah 100% adalah indikator jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan dengan capaian 93,03%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan tajam untuk capaian indikator Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit (154,44%) dibanding dua tahun sebelumnya (100% dan 100,07%).

Pada tahun 2019 dari 12 indikator kinerja terdapat 1 indikator yang belum berhasil mencapai target atau capaian dibawah 100%. Adapun indikator yang belum tercapai adalah indikator jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan dengan capaian 93,03%. Tidak tercapainya indikator disebabkan karena adanya kekosongan persediaan vaksin meningitis pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai di bulan Mei dan Juni 2019. Sehingga walaupun permohonan sertifikat ICV bagi pelaku perjalanan yang melaksanakan ibadah umroh meningkat, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai tidak dapat memberikan layanan vaksinasi tersebut sehingga berdampak pada penurunan penerbitan dokumen ICV. Adanya



kebijakan baru yang mewajibkan calon Jemaah umroh untuk melakukan biometri (scan mata) di Pekanbaru ikut menyebabkan penurunan penerbitan ICV pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai karena calon jemaah lebih memilih melakukan vaksinasi pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pekanbaru.

Pengukuran pencapaian indikator kinerja KKP Kelas III Dumai tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut:

Pencapaian Indikator Kinerja KKP Kelas III Dumai Tahun 2019

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3		4	5	6
1	Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1	Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	22.000 Sertifikat	28.397 Sertifikat	129,08
		a.	Pengawasan Alat Angkut (Kedatangan dan Keberangkatan Kapal) dalam rangka penerbitan Port Health Quarantine Clearance	21.100 Dokumen	27.271 Dokumen	129,25
		b.	Penerbitan Sertifikat Ship Sanitation Certificate (SSCEC/SSCC)	900 Sertifikat	1.126 Sertifikat	125,11
		2	Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	95 %	95 %	100
		a.	Penyelidikan Epidemiologi Kasus Positif Malaria	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		3	Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	15.000 Sertifikat	23.166 Sertifikat	154,44



	a.	Pemeriksaan Kapal dalam Karantina dalam rangka penerbitan Certificate of Pratique (CoP)	4.500 Dokumen	4.811 Dokumen	106,91
	b.	Surveilans Rutin	10.500 Laporan	18.355 Laporan	174,81
	4	Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	24 Layanan	24 Layanan	100
	a.	Pelayanan kesehatan posko tahun baru	8 layanan	8 layanan	100
	b.	Pelayanan kesehatan posko lebaran idul fitri	8 layanan	8 layanan	100
	c.	Pelayanan posko natal	8 layanan	8 layanan	100
	5	Jumlah pelabuhan/bandara/PLB D yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan yang berpotensi wabah	1 Pelabuhan	1 Pelabuhan	100
	a.	Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Pelabuhan/ Bandara	1	1	100
	6	Jumlah sertifikat/ Surat Izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	3.000 Sertifikat	2.791 Sertifikat	93,03
	a.	Penerbitan Dokumen ICV	2.984Dokumen	2.727 Dokumen	91,39
	b.	Penerbitan Izin Angkut Orang Sakit	2 Dokumen	40 Dokumen	200
	c.	Sertifikat Izin Angkut Jenazah	2 Dokumen	7 Dokumen	350
	d.	Sertifikat Ijin Laik Terbang	12 Dokumen	17 Dokumen	141,67
	7.	Jumlah pelabuhan/bandara/PLB D yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	8 Pelabuhan	8 Pelabuhan	100



2.	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotik	8	Jumlah pelabuhan/bandara/PLB D bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	8 Pelabuhan	8 Pelabuhan	100
3.	Menurunnya penyakit menular langsung	9	Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	700 Orang	1.277 Orang	182,43
		a	Skrining HIV	300 orang	697 orang	232,33
		b	Deteksi Dini terduga TB	400 orang	580 Orang	145
4.	Meningkatnya dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit	10	Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40 Dokumen	40 Dokumen	118,18
		A	RKAKL / DIPA	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		B	Laporan keuangan	2 Laporan	2 Dokumen	100
		C	Laporan BMN	2 Laporan	2 Dokumen	100
		D	Emonev DJA	12 Laporan	12 Dokumen	100
		E	Emonev Bappenas	4 Laporan	12 Dokumen	300
		F	LAKIP	1 Laporan	1 Dokumen	100
		G	Laporan Tahunan	1 Laporan	1 Dokumen	100
		H	Laporan Profil	1 Laporan	1 Dokumen	100
		I	Laporan Eksekutif Bulanan	12 Laporan	12 Dokumen	100
		J	Proposal PNBPN	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		K	Laporan Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		11	Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	2 Pelatihan	2 Pelatihan	100
12	Jumlah pengadaan sarana prasarana	25 Unit	25 Unit	100		
Rata-rata Capaian Kinerja						114,76



Realisasi anggaran KKP Kelas III Dumai atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019 adalah sebesar Rp. 12.605.285.491,- atau sebesar 98,27% dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.12.826.649.000,-. Dengan persentase realisasi tertinggi berada di output Pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung sebesar 99,18% dan persentase realisasi terendah pada output pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik sebesar 96,12%. Namun secara keseluruhan realisasi anggaran KKP Kelas III Dumai tahun 2019 telah melewati target realisasi anggaran minimal yang ditetapkan Ditjen P2P yaitu 95%.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai berada di wilayah Kota Dumai, Provinsi Riau. Secara geografis Kota Dumai terletak pada antara 101.23.37.-101.8.13 Bujur Timur dan 1.23.23.1.24.23 Lintang Utara dan pantai timur Sumatera dengan koordinat 01.41'10"LS dan 101.27"20"BT berada di Jalan Datuk Laksamana Kelurahan Buluh Kasab Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.

Berdasarkan Permenkes Nomor 2348/Menkes/Per/IX/2011, Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut KKP menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kekarantinaan;
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;



3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
7. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan



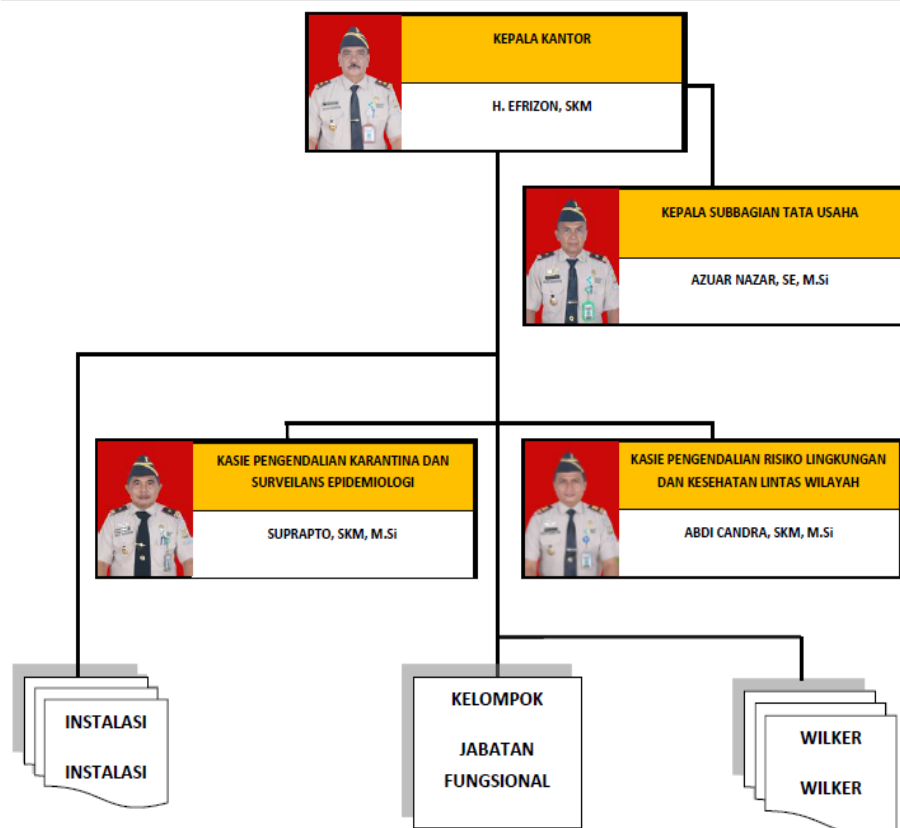
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Dumai masuk dalam klasifikasi Kelas III, yang terdiri dari

1. Sub Bagian TataUsaha
2. Seksi Pengendalian Karantina dan SurveilansEpidemiologi
3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan LintasWilayah
4. Instalasi Laboratorium
5. Wilayah Kerja
6. Kelompok Jabatan Fungsional



STRUKTUR ORGANISASI KKP KELAS III DUMAI



Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai diklasifikasikan ke dalam kelas III dan mempunyai 8 (delapan) wilayah kerja, yaitu :

1. Pelabuhan Laut Bengkalis
2. Pelabuhan Laut Bagansiapiapi
3. Pelabuhan Laut Sungai Pakning
4. Pelabuhan Laut Panipahan
5. Pelabuhan Laut Senebui
6. Pelabuhan Laut Tanjung Medang
7. Kawasan Industri Pelitung
8. Bandara Pinang Kampai



C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

a. Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu dukungan SDM merupakan faktor kekuatan bagi KKP. SDM yang diperlukan tidak hanya yang memiliki kemampuan manajerial yang baik, namun penting juga didukung oleh sumber daya teknis yang handal di dalam penyusunan program maupun dalam pelaksanaan tugas di lapangan.



Distribusi Pegawai KKP Kelas III Dumai

Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jenis Jabatan	Jumlah	%
1	Sanitarian Ahli Madya	1	2,1
2	Sanitarian Ahli Pertama	1	2,1
3	Sanitarian Mahir	3	6,5
4	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	1	2,1
5	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	4	8,6
6	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	1	2,1
7	Epidemiolog Kesehatan Mahir	1	2,1
8	Sanitarian Penyelia	1	2,1
9	Epidemiolog Kesehatan Mahir	3	6,5
10	Epidemiolog Kesehatan Terampil	3	6,5
11	Dokter Ahli Muda	1	2,1
12	Sanitarian Ahli	2	4,3
13	Epidemiolog Kesehatan Ahli	3	6,5
14	Analisis Keuangan	1	2,1
15	Pranata Komputer Ahli	1	2,1
16	Dokter	1	2,1
17	Pengelola Barang Milik Negara	2	4,3
18	Arsiparis	3	6,5
19	Entomolog Kesehatan Ahli	2	4,3
20	Perawat Ahli	1	2,1
21	Sanitarian	1	2,1
22	Asisten Apoteker	1	2,1
23	Bendahara	2	4,3
24	Analisis Kepegawaian	1	2,1
25	Petugas Keamanan	2	4,3
26	Kepala Kantor	1	2,1
27	Kepala Administrasi dan Umum	1	2,1
JUMLAH		42	100,00



Sumber Daya Manusia Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai terdiri dari 46 orang pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai sebagian besar memiliki tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 20 pegawai (43%) dan 16 pegawai (35%) berpendidikan Diploma III. sebanyak 32 (70%) pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai adalah golongan III dan sebanyak 9 (20%) pegawai golongan II, sebanyak 3 (7%) golongan IV dan 2 (4%) pegawai golongan I. jabatan pelaksana masih menjadi proporsi terbesar jabatan pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai yaitu sebanyak 34 pegawai atau (74%), 8 pegawai atau 17% telah menduduki jabatan fungsional kesehatan dan terdapat 4 pegawai atau 9% menduduki jabatan struktural. 4 pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai telah mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional kesehatan.

Adanya persyaratan dalam pengajuan DUPAK (Daftar usulan Penetapan Angka Kredit) yaitu pegawai yang bersangkutan harus telah menduduki/mengerjakan pekerjaan tersebut minimal 2 tahun maka tahun 2019 hanya 1(satu) orang pegawai KKP Dumai yang bisa mengajukan DUPAK. jabatan fungsional kesehatan terbanyak adalah Sanitarian dan Epidemiolog Kesehatan Ahli dengan jumlah masing-masing 4 pegawai.

Pada jabatan bukan tenaga kesehatan, arsiparis menjadi jabatan dengan pemangku terbanyak yaitu 4 pegawai. Pada tahun 2019 terdapat penambahan 1 orang pegawai dari Pemerintah Kota Dumai. Pegawai pindahan tersebut belum memiliki jabatan, namun proses pengajuan jabatan telah dilakukan kepada unit utama Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.



Didalam melaksanakan analisis kebutuhan SDM diperlukan pertimbangan background pendidikan yang diperlukan, kemudian didukung seleksi penerimaan SDM dari pusat yang lebih selektif sesuai dengan analisis kebutuhan yang disusulkan KKP Kelas III Dumai. Hal tersebut merupakan faktor pendukung terpenuhinya SDM yang cukup memadai. Pengembangan selanjutnya diperlukan program peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM baik berupa pendidikan lanjutan formal, diklat-diklat teknis program, dan lain-lain yang sangat diperlukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang diperlukan.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana yang tersedia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai sebagai kekuatan dalam melaksanakan tugasnya, merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Gedung yang tersedia di dalam wilayah Pelabuhan Dumai memudahkan dan mempercepat dalam melaksanakan pengawasan di Wilayah Pelabuhan Dumai. Kendaraan operasional roda dua maupun roda empat sebagai sarana dalam memudahkan mobilitas. Sarana dan prasarana lain yang menunjang seperti ambulance, instalasi laboratorium, ruang isolasi, dan lain-lain sebagai kekuatan yang menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



Gambaran Inventaris Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai

Terdiri Dari Barang Bergerak dan Tidak Bergerak.

No	Nama Barang	Keterangan
I. Barang Bergerak		
1	Stasion Wagon	1 Unit
2	Mobil unit Kesmas	3 Unit
3	Mini Bus	1 Unit
4	Pick Up	1 Unit
5	Ambulance	4 Unit
6	Kendaraan Roda 2	8 Unit
II. Barang Tidak Bergerak		
1	Bangunan gedung KKP	luas = 725 m2 dengan luas tanah = 2170 m2
2	Bangunan gedung Poli Klinik	luas = 120 m2 dan luas tanahnya = 1.325 m2
3	Gudang tertutup permanen	luas= 40 m2
4	Bangunan gedung Wilker Sungai Pakning	luas = 70 m2 dan luas tanahnya = 441 m2
5	Bangunan Kantor Wilker Bengkalis	luas = 136 dan luas tanahnya = 278 m2

c. Lingkungan Kerja

Kerjasama dengan lintas sektor terjalin dengan baik melalui kerjasama yang baik dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel dan kota Banjarmasin dalam penanganan Embarkasi / Debarkasi Haji. Kerjasama yang baik dengan Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten di Wilayah kerja dalam penanganan vaksinasi bagi calon jamaah haji dan umrah. Kerjasama dengan lintas sector di pelabuhan dan bandara. Kesadaran yang semakin tinggi dari operator bandara dan pelabuhan dalam menciptakan wilayah bebas vektor pes. Kesadaran



masyarakat semakintinggi dalam ikut serta pencegahan penyakit DBD. Bandara dan pelabuhan merupakan tempat-tempat umum yang potensial untuk transfer vektor dan penyakit malaria dari berbagai daerah. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat dalam upaya pengawasan dan pemberantasan vektor. Semakin bertambahnya jumlah TPM di pelabuhan dan bandara. Isu keamanan pangan masih menjadi masalah kesehatan. Belum semua penjamah makanan mendapatkan pelatihan higiene sanitasi. Kebutuhan terhadap air bersih/air minum semakin meningkat seiring dengan meningkatnya aktifitas di pelabuhan dan bandara. Tuntutan terhadap kualitas air bersih/air minum semakin meningkat.

d. Sumber Anggaran

Tahun 2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai telah melaksanakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dilihat dari penyerapan dana dan pencapaian indikator output dari target telah ditetapkan sebelumnya. Dari pencapaian kedua hal tersebut dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalannya. Pada tahun 2019 total anggaran yang disediakan untuk program Pengendalian dan pencegahan Penyakit sebesar Rp.12.826.649.000,-, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 12.605.285.491,- atau sebesar 98,27%. Dengan persentase realisasi tertinggi berada di output Pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung sebesar 99,18% dan persentase realisasi terendah pada output pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik sebesar 96,12%. Namun secara keseluruhan realisasi anggaran KKP Kelas III Dumai tahun 2019 telah melewati target realisasi anggaran minimal yang ditetapkan Ditjen P2P yaitu 95%.



Alokasi Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun Anggaran 2019

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp.5.559.784.000,-	5.508.076.698,-	99,07
Belanja Barang	Rp.5.694.065.000,-	5.538.506.768,-	97,27
Belanja Modal	Rp.1.558.702.025,-	1.558.702.025,-	99,10
TOTAL	Rp.12.826.649.000,-	12.605.285.491,-	98,27

Target dan Realisasi PNB

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2019

TARGET PNB	PENGUNAAN PNB	REALISASI PNB	
		TARGET	PENGUNAAN
Rp.1.520.760.000	Rp.1.305.377.000	Rp.2.307.214.062	Rp.1.254.970.147

2. Permasalahan

- Belum lengkapnya peraturan turunan dari undang- undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan
- Belum optimalnya pengawasan terhadap alat angkut di pelabuhan disebabkan keterbatasan jumlah tenaga dibandingkan dengan program kegiatan yang harus dilaksanakan.
- Belum adanya pemeliharaan secara rutin terhadap peralatan dan perlengkapan kekarantinaan seperti thermal scanner dan body cleaning system diakibatkan karena keterbatasan teknisi lokal yang dapat memperbaiki alat tersebut sehingga harus mendatangkan teknisi dari luar daerah atau pusat



- d. Belum seluruh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai khususnya yang bertugas di pintu masuk (point of entry) baik di pelabuhan ataupun bandara yang mempunyai kompetensi teknis kekarantinaaan dan surveilans epidemiologi.
- e. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pendukung kegiatan di lapangan seperti ambulance evakuasi penyakit menular, thermal scanner, termometer digital infrared
- f. Belum tersedianya gudang atau workshop khusus untuk penyimpanan sarana pengendalian vektor dan pengendalian risiko lingkungan
- g. Terbatasnya keberadaan pedagang besar farmasi di kota dumai menyebabkan kesulitan dalam penganggaran serta pengadaan bahan kimia untuk kegiatan pengendalian vektor dan pengendalian risiko lingkungan.
- h. Belum adanya keseragaman tindakan dalam pelaksanaan fumigasi, disinfeksi, dan disinfeksi, utamanya pada pesawat yang datang dari luar negeri,
- i. Pengetahuan pemilik dan penjamah makanan masih perlu ditingkatkan.
- j. Penyelenggara pelabuhan/bandara masih perlu meningkatkan penyediaan air minum baik dalam kualitas maupun kuantitas
- k. Kurangnya sosialisasi hasil pengawasan TPM dan surveilans vektor di pelabuhan dan bandara kepada stake holder terkait.
- l. ASN jarang mendapatkan pelatihan terkait pelayanan kesehatan
- m. Masih kurangnya ketersediaan SDM Kesehatan di wilayah kerja
- n. Keterbatasan persediaan vaksin meningitis pada KKP Kelas III Dumai dengan proses permintaan yang cukup memerlukan waktu
- o. Masih kurangnya ketersediaan SDM Kesehatan di wilayah kerja



- p. Keterbatasan persediaan vaksin meningitis pada KKP Kelas III Dumai dengan proses permintaan yang cukup memerlukan waktu

3. Peluang dan tantangan

3.1. Peluang

Jumlah industri pengolahan kelapa sawit dan turunannya yang terus bertambah di sepanjang pesisir dumai menjadikan objek pengendalian risiko lingkungan di wilayah pelabuhan semakin banyak sehingga menambah kompleksitas teknik dan metode pengukuran serta pengendalian risiko lingkungan menjadi tantangan di tahun mendatang.

Jumlah pelabuhan khusus yang semakin bertambah menjadi peluang serta meningkatkan risiko pencemaran lingkungan pada badan air, keberadaan pelabuhan khusus ini menambah jumlah pelabuhan yang diawasi menjadikan tantangan semakin besar.

Perubahan bentuk lingkungan akibat dari perkembangan wilayah untuk peningkatan ekonomi membuat ekosistem rusak seperti semakin turunnya luas mangrove, abrasi dan banyaknya galian menjadi risiko peningkatan penyakit berbasis lingkungan.

3.2. Tantangan

Tantangan

nya adalah masyarakat pesisir merupakan kelompok yang rentan di wilayah pelabuhan yan beresiko menerima dampak langsung dari aktivitas pelabuhan selain itu peluangnya adalah dengan kelompok masyarakat yang



homogen dan tinggal pada komunitas yang terpadu membuat upaya peningkatan derajat kesehatan dapat dilakukan secara terpadu.

D. Lingkungan Strategis

Akselerasi pembangunan kesehatan di masa depan memerlukan lingkungan strategis yang kondusif, pembangunan berwawasan kesehatan sebagai strategis pembangunan nasional--belum dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan. Globalisasi merupakan tantangan, masalah, dan potensi untuk pembangunan. Pengaruh globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan pelayanan melalui berbagai kesepakatan internasional, akan mempengaruhi berbagai aspek penyelenggaraan upaya kesehatan dan memerlukan, persiapan dari pemerintah dan masyarakat.

Transisi demografi, dengan terus bertambahnya jumlah penduduk telah dapat diprediksi sebagai dampak dari pembangunan baik dalam bidang ekonomi, keluarga berencana dan kesehatan, serta gizi. Dalam piramida kependudukan, terlihat adanya kecenderungan mengecilnya jumlah penduduk usia muda/balita dan meningkatnya jumlah segmen angkatan kerja dan usia lanjut secara bermakna di tahun-tahun mendatang.

Peran ilmu pengetahuan dan teknologi sangat menentukan keberhasilan berbagai program pembangunan termasuk pembangunan bidang kesehatan. Berbagai penemuan yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan sangat mendukung pelaksanaan program pembangunan kesehatan. Dalam merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, upaya penapisan belum dilaksanakan secara efektif. Sehingga penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih justru menyebabkan mahalanya biaya kesehatan.



Lingkungan fisik dan biologi berubah sangat cepat akibat berbagai pembangunan yang dilaksanakan. Terlihat kecenderungan bahwa pembangunan seringkali diterjemahkan pada perubahan fisik yang cenderung mudah terlihat. Di Pedesaan, implikasinya adalah eksploitasi lingkungan yang berlebihan yang berakibat rusaknya ekologi alam. Eksploitasi alam yang semakin tidak terkendali dan perubahan; lingkungan mengarah pada perusakan alam yang berakibat fatal. Selain itu faktor perubahan iklim, perubahan keseimbangan ekologi, eksploitasi alam yang berlebihan, meningkatnya bencana alam dan sebagainya akan membawa dampak negatif yang makin serius pada kesehatan masyarakat dimasa mendatang. Pencemaran udara, air dan tanah serta perubahan lingkungan biologis, penggunaan pestisida, insektisida, dan fungisida yang berlebihan menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Perubahan lingkungan biologis juga menyebabkan rangsangan patogenesis terhadap beberapa jenis bakteri, virus dan jasad renik lainnya yang akan mengancam kesehatan masyarakat dimasa mendatang.

Perkembangan terakhir tentang situasi kesehatan global adalah adanya pandemic covid-19 yang melanda dunia. Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Disease (COVID-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia. Manifestasi klinis biasanya muncul dalam 2 hari hingga



14 hari setelah paparan. Tanda dan gejala umum infeksi coronavirus antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (corona virus disease, COVID-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran ke luar wilayah Wuhan dan negara lain. Sampai dengan 16 Februari 2020, secara global dilaporkan 51.857 kasus konfirmasi di 25 negara dengan 1.669 kematian (CFR 3,2%). Rincian negara dan jumlah kasus sebagai berikut: China 51.174 kasus konfirmasi dengan 1.666 kematian, Jepang (53 kasus, 1 Kematian dan 355 kasus di cruise ship Pelabuhan Jepang), Thailand (34kasus), Korea Selatan (29 kasus), Vietnam (16kasus), Singapura (72 kasus), Amerika Serikat (15 kasus), Kamboja (1 kasus), Nepal (1 kasus), Perancis (12 kasus), Australia (15 kasus), Malaysia (22 kasus), Filipina (3 kasus, 1 kematian), Sri Lanka (1 kasus), Kanada (7kasus), Jerman (16 kasus), Perancis (12 kasus), Italia (3 kasus), Rusia (2 kasus), United Kingdom (9 kasus), Belgia (1 kasus), Finlandia (1 kasus), Spanyol (2 kasus), Swedia (1 kasus), UEA (8 kasus), dan Mesir (1 Kasus).

Kota Dumai sampai dengan agustus 2020 jumlah terkonfirmasi positif covid-19 sebanyak 129 kasus dengan rincian 53 isolasi mandiri, 27 dirawat di Rumah Sakit, 47 sembuh dan 2 orang meninggal dunia.



Diantara kasus tersebut, sudah ada beberapa petugas kesehatan yang dilaporkan terinfeksi. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan sebagian besar adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru.

Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Corona virus Disease (COVID-19) 12 kasus di Wuhan memiliki riwayat bekerja, menangani, atau pengunjung yang sering berkunjung ke Pasar Grosir Makanan Laut Huanan. Sampai saat ini, penyebab penularan masih belum diketahui secara pasti. WHO melaporkan bahwa penularan dari manusia ke manusia terbatas (pada kontak erat dan petugas kesehatan) telah dikonfirmasi di China maupun negara lain. Berdasarkan kejadian MERS dan SARS sebelumnya, penularan manusia ke manusia terjadi melalui droplet, kontak dan benda yang terkontaminasi, maka penularan COVID-19 diperkirakan sama. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat.



BAB II

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

A. Visi dan Misi

Dalam Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Dumai 2020-2024 tidak ada visi dan misi sendiri. Namun Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Dumai mendukung Rencana Aksi Program Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Renstra Kemenkes 2020-2024 dalam melaksanakan Visi Presiden Republik Indonesia yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mewujudkan Visi Presiden tersebut maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif
3. Mandiri dan Berdaya Saing
4. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
5. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
6. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
7. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
8. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
9. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Program P2P mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui upaya preventif dan promotif. KKP Kelas III Dumai sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT)



dari Kementerian Kesehatan yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Ditjen P2P tentunya mendukung dan turut berkontribusi dalam pencapaian program P2P dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi KKP dalam upaya preventif dan promotif di wilayah Pelabuhan dan Bandara yang menjadi wilayah kerja KKP Kelas III Dumai.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

B. Tujuan

Tujuan strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 adalah:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola yang baik , bersih dan inovatif

Tujuan strategis Ditjen P2P tahun 2020-2024 adalah peningkatan pencegahan dan pengendalian dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Selaras dengan tujuan strategis Kementerian Kesehatan dan Ditjen P2P maka Kantor Kesehatan Kelas III Dumai menetapkan tujuan strategis tahun 2020-2024 adalah Peningkatan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah. Terselenggaranya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah secara



berhasil guna dan berdaya guna dapat mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui:

1. Pelaksanaan dukungan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah
2. Pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada satker

C. Sasaran Strategis

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Kegiatan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai mempunyai sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 yaitu Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
Peningkatan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Meningkatnya jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan pada tahun 2024 2. Tercapainya persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan pada tahun 2024 3. Tercapainya indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara pada tahun 2024



		4. Meningkatnya nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2024 5. Tercapainya persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan pada akhir tahun 2024 6. Meningkatnya kinerja implementasi WBK satker pada tahun 2024 7. Tercapainya persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL pada tahun 2024
--	--	---

Dalam mencapai Sasaran Strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai menetapkan indikator sebagai berikut :

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantina kesehatan sebanyak 3.320.127 pada tahun 2024
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 100% pada tahun 2024
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara sebesar 100% pada tahun 2024
4. Nilai Kinerja Anggaran dengan nilai 90 pada tahun 2024
5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 90% pada tahun 2024
6. Kinerja Implementasi WBK satker dengan nilai 85 pada tahun 2024
7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 90% pada tahun 2024



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI

Arah kebijakan dan strategi kegiatan KKP Kelas III Dumai adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi ditetapkan arah kebijakan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai sebagai berikut :

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko
2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia
4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program

A. Strategi

Seperti yang telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:

- a. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko
- b. Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko
- c. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko
- d. Peningkatan komunikasi dan advokasi
- e. Penguatan akuntabilitas
- f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
- g. Kerjasama lintas sektor dan program



B. Kerangka regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan
2. UU RI No. 4 tahun 1984, tentang Wabah penyakit menular
3. UU RI No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
4. UU RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
5. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
7. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004, tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
8. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2007, tentang Keselamatan Radiasi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan
10. Permenkes 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum



11. Permenkes 612 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karkes pada PHEIC
12. Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas laporan kinerja instansi, pemerintah.
13. Permenkes No. 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes
14. Kepmenkes 1314 tahun 2010 tentang Pedoman SDM, Sarana dan Prasarana KKP
15. Permenkes 1096 tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga
16. Permenkes No. 2348 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permenkes No.356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
17. International Health Regulations (IHR) 2005

Saat ini sudah tersedia regulasi berupa SOP yang disusun oleh KKP Kelas III Dumai antara lain :

1. SOP Pelayanan Kegiatan Kekarantinaan Kesehatan sebanyak 8 SOP
2. SOP Kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan sebanyak 29 SOP
3. SOP Pelayanan Dukungan Manajemen sebanyak 55 SOP

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai, beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain :

1. Regulasi dalam deteksi dini dan isolasi penyakit KKMD
2. Regulasi dalam penindakan pelanggaran kekarantinaan oleh PPNS



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KEGIATAN

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, tujuan, arah kebijakan, strategi dan sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditetapkan target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan KKP Kelas III Dumai 2020-2024.

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Mengacu pada Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, tujuan, arah kebijakan dan strategis, maka target kinerja KKP Kelas III Dumai adalah:

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantina kesehatan sebanyak 3.320.127 pada akhir tahun 2024
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 100 persen pada akhir tahun 2024
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara sebesar 100 persen pada akhir tahun 2024
4. Nilai Kinerja Anggaran dengan nilai 90 pada akhir tahun 2024
5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 90 persen pada akhir tahun 2024
6. Kinerja Implementasi WBK satker dengan nilai 85 pada akhir tahun 2024



7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 90 persen pada akhir tahun 2024

B. Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan strategis, sasaran strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-2024.

Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai adalah Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah, maka untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Pemeriksaan kedatangan kapal dalam karantina
- b. Pemeriksaan/pengawasan keberangkatan kapal
- c. Pengawasan/pemeriksaan Anah Buah Kapal (ABK) dan Crew Pesawat
- d. Pengawasan/pemeriksaan penumpang kapal/pesawat
- e. Surveilans kesehatan Jemaah Haji
- f. Surveilans kesehatan calon Jemaah umrah
- g. Skrining penyakit TB
- h. Skrining penyakit HIV/AIDS
- i. Pengawasan/pemeriksaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah
- j. Pengawasan/pemeriksaan barang bawaan penumpang / alat angkut
- k. Pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan SSCC/SSCEC



- l. Pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan Sertifikat P3K
 - m. Pemeriksaan/pengawasan TTU (Tempat-Tempat Umum)
 - n. Pemeriksaan/pengawasan TPM (Tempat Pengolahan Makanan)
 - o. Pengadaan alat dan bahan untuk pemeriksaan sanitasi kapal dalam rangka penerbitan dokumen SSCEC/SSCC
 - p. Pemeriksaan sanitasi kapal dalam rangka penerbitan SSCEC/SSCC
 - q. Pengadaan alat dan bahan untuk inspeksi sanitasi
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Tindakan Karantina/isolasi
- b. Tindakan rujukan crew/penumpang kapal/pesawat
- c. Tindakan penyehatan alat angkut dan barang (Fumigasi, disinfeksi, disinseksi, dan dekontaminasi)
- d. Pengawasan dan penerbitan dokumen Izin Angkut Orang Sakit
- e. Pengawasan dan penerbitan dokumen Izin Angkut Jenazah
- f. Penerbitan dokumen ICV pada Calon Jemaah Umrah
- g. Legalisasi ICV pada Calon Jemaah Haji
- h. Penanganan/penindakan terhadap pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan
- i. Tindakan penyehatan lingkungan pada alat angkut berupa kegiatan desinfeksi alat angkut
- j. Tindakan penyehatan lingkungan berupa kegiatan desinfeksi TTU dan TPM
- k. Tindakan survei dan pengendalian vektor pada situasi khusus



3. Indeks pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Deseminasi atau umpan balik kegiatan survei dan pengendalian vektor
- b. Survei vektor DBD
- c. Survei vektor Diare
- d. Survei vektor Pes
- e. Survei vektor Malaria
- f. Pengendalian Vektor DBD
- g. Pengendalian Vektor Diare
- h. Inspeksi sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
- i. Inspeksi sanitasi Tempat-tempat Umum (TTU)
- j. Inspeksi sanitasi Sarana Air Bersih (SAB)

4. Nilai kinerja anggaran

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Melaksanakan seluruh kegiatan yang ada pada DIPA KKP Kelas III Dumai seperti, Sosialisasi, Koordinasi, Konsultasi, Bimtek, pengadaan belanja modal dan bahan, belanja pegawai, dan lain sebagainya.
- b. Melakukan monitoring Monev DJA dan Bapennas

5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Melaksanakan rekonsiliasi Internal SAI dan SIMAK BMN
- b. Melaksanakan rekonsiliasi eksternal secara tepat waktu

6. Kinerja implementasi WBK satker

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Melaksanakan pendampingan WBK oleh unit utama es 1 dan tim Itjen
- b. Melaksanakan self assesment penilaian WBK



7. Persentase peningkatan kapasitas ASN

Kegiatan yang dilakukan : Mengikuti diklat, bimbingan teknis, workshop, seminar, pelatihan yang dilaksanakan selama tahun 2020

C. Kerangka Pendanaan

Dalam mencapai target sasaran kegiatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai diperlukan dukungan pendanaan secara keseluruhan yang bersumber dari Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kerangka Pendanaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai

Tahun 2020 – 2024

Indikator	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatnya jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan pada tahun 2024	385.611	404.892	445.381	489.919	538.911
2. Tercapainya persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang	331.617	345.660	348.197	365.607	383.888



dan lingkungan pada tahun 2024	278.716	292.651	407.280	427.644	449.026
3. Tercapainya indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara pada tahun 2024	9.125.269	9.018.530	9.920.322	10.880.534	11.936.768
4. Meningkatnya nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2024	174.934	78.354	86.189	94.808	104.289
5. Tercapainya persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan pada akhir tahun 2024	32.204	38.645	46.374	55.649	66.779
6. Meningkatnya kinerja implementasi WBK satker pada tahun 2024	77.678	132.411	145.652	160.217	176.238
7. Tercapainya persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL pada tahun 202					



BAB V

PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN

Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Selain itu pemantauan juga dilakukan dalam rangka memastikan target indikator yang ditetapkan berjalan sesuai rencana dan melakukan upaya dini jika menemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai melakukan pemantauan secara berkala secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan berdasarkan hasil kegiatan dan penugasan pada setiap staf, subbag/seksi secara berjenjang yang dilakukan melalui kegiatan lapangan maupun pertemuan.

Penilaian rencana aksi kegiatan KKP Kelas III Dumai bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan kegiatan KKP Kelas III Dumai selama 5 tahun ke depan. Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, untuk proses pengambilan keputusan apakah suatu program atau kegiatan diteruskan, dikurangi, dikembangkan atau diperkuat. Untuk itu penilaian diarahkan guna mengkaji efektifitas dan efisensi pengelolaan program dan kegiatan.



Penilaian dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai berdasarkan capaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam pencapaian sasaran.

Pelaksanaan program yang baik akan jauh lebih bermakna bila didukung dengan pelaporan kegiatan yang handal. Di dalam pelaporan tersebut ada pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk menilai keberhasilan program. Pelaporan pada KKP Kelas III Dumai dibuat dalam bentuk sebagai berikut:

1. Laporan evaluasi kinerja
2. Laporan keuangan
3. Laporan tahunan
4. Laporan akuntabilitas kinerja

Pelaporan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan.



BAB VI

P E N U T U P

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Dumai Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya KKP Kelas III Dumai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dalam upaya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah, KKP Kelas III Dumai mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi secara berkala. Evaluasi atas relevansi target indikator kinerja akan terus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sampai tahun 2024 yang merupakan tahun akhir pada periode RAK 2020-2024.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua bagian di KKP Kelas III Dumai, Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Dumai upaya dukungan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah memberikan kontribusi yang bermakna dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit khususnya dan pada pembangunan kesehatan secara umum dalam menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada RAK 2020-2024 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Penanggungjawab Tiap Indikator Kegiatan KKP Kelas III Dumai

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Kepala Seksi Pengendalian Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi	Kepala Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Kepala Seksi Pengendalian Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi	Kepala Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Kepala Seksi Pengendalian Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi	Kepala Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah
		4	Nilai kinerja anggaran	Kepala Subbag Tata Usaha	Kepala Subbag Tata Usaha
		5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	Kepala Subbag Tata Usaha	Kepala Subbag Tata Usaha
		6	Kinerja implementasi WBK satker	Kepala Subbag Tata Usaha	Kepala Subbag Tata Usaha
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Kepala Subbag Tata Usaha	Kepala Subbag Tata Usaha

Matriks Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 – 2024

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai

No	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun	Akumulasi jumlah pemeriksaan penapisan orang, alat angkut sesuai standar karantina, pemeriksaan barang dan pemeriksaan lingkungan (TUT, TPM, air dan udara)	1.593.450	1.752.795	1.928.075	2.120.882	2.332.970
2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator no.1	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%	90%	94%	95%	97%	100%
3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	Status faktor risiko dipintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun	Akumulasi persentase target dan capaian : Kelengkapan data surveilans, Sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam, Penyusunan dokumen renkon yang baru (kumulatif dokumen renkon,tidak termasuk reviu) berdasarkan pintu masuk negara, Indeks pinjal < 1 (pelabuhan/bandara), HI perimeter = 0 (pelabuhan/bandara), Tidak ditemukan larva anopheles (pelabuhan/bandara), Kepadatan kecoa rendah (pelabuhan/bandara), Kepadatan lalat < 2 (pelabuhan/bandara), TTU memenuhi syarat (per titik), TPM layak hygiene (per titik), Kualitas air bersih memenuhi syarat (per titik). Kesebelas persentasi parameter dijumlahkan dan dibagi 11 dikali 100%	80%	85%	90%	95%	100%
4	Nilai kinerja anggaran	Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi volume keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik	Realisasi volume kegiatan dibagi target volume kegiatan dikali realisasi indikator kegiatan dibagi target indikator kegiatan.	80	83	85	87	90
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi	Hasil perhitungan dari transaksi pelaksanaan anggaran dengan KPPN dan Kanwil DJPb dengan 13 indikator kinerja yang terotomatisasi dari aplikasi OMSPAN	90	91	92	93	95
6	Kinerja implementasi WBK satker	Perolehan nilai implementasi menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) pada satuan kerja melalui penilaian mandiri (self assesment) yang dilakukan oleh satuan kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) zona integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P	Nilai implementasi WBK satker dihitung dari akumulasi nilai total pengungkit dan nilai total hasil	70	73	75	80	85
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dna nasional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	80%	85%	90%	95%	100%

Matriks Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 – 2024 (Perubahan Pertama)
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai

No	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun	Akumulasi jumlah pemeriksaan penapisan orang, alat angkut sesuai standar karantina, pemeriksaan barang dan pemeriksaan lingkungan (TUT, TPM, air dan udara)	3.018.297	3.048.480	3.169.212	3.259.761	3.320.127
2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator no.1	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%	90%	94%	95%	97%	100%
3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	Status faktor risiko dipintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun	Akumulasi persentase target dan capaian : Kelengkapan data surveilans, Sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam, Penyusunan dokumen renkon yang baru (kumulatif dokumen renkon,tidak termasuk reviu) berdasarkan pintu masuk negara, Indeks pinjal < 1 (pelabuhan/bandara), HI perimeter = 0 (pelabuhan/bandara), Tidak ditemukan larva anopheles (pelabuhan/bandara), Kepadatan kecoa rendah (pelabuhan/bandara), Kepadatan lalat < 2 (pelabuhan/bandara), TTU memenuhi syarat (per titik), TPM layak hygiene (per titik), Kualitas air bersih memenuhi syarat (per titik). Kesebelas persentasi parameter dijumlahkan dan dibagi 11 dikali 100%	85%	89%	93%	97%	100%
4	Nilai kinerja anggaran	Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi volume keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik	Realisasi volume kegiatan dibagi target volume kegiatan dikali realisasi indikator kegiatan dibagi target indikator kegiatan.	80	83	85	87	90
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	Kepatuhan satker dalam menyampaikan laporan keuangan dengan parameter jumlah dan ketepatan waktu upload dan rekonsiliasi	Penilaian persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan dihitung berdasarkan jumlah total skor pada tiap parameter yang dinilai dibagi dengan jumlah parameternya dikalikan dengan persentase maksimal 100%	80%	83%	85%	87%	90%
6	Kinerja implementasi WBK satker	Perolehan nilai implementasi menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) pada satuan kerja melalui penilaian mandiri (self assesment) yang dilakukan oleh satuan kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) zona integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P	Nilai implementasi WBK satker dihitung dari akumulasi nilai total pengungkit dan nilai total hasil	70	73	75	80	85
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dna nasional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	45%	60%	75%	85%	90,00%

MATRIK PERUBAHAN PERTAMA RAK 2020-2024
KKP KELAS III DUMAI

No	SASARAN	No.	SEMULA		SASARAN	MENJADI		
			INDIKATOR	TARGET		No.	INDIKATOR	TARGET
1	Terselenggaranya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	1.593.450	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	3..018.297
2	Terwujudnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%
		3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	80%		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%
3	Meningkatnya tata kelola manajemen KKP	4	Nilai kinerja anggaran	80		4	Nilai kinerja anggaran	80
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90		5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%
		6	Kinerja implementasi WBK satker	70		6	Kinerja implementasi WBK satker	70
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%